

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Setelah Perang Dunia ke II (PD II) berakhir, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai dihadapkan pada dua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama, terlihat dari usaha beberapa negara untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaannya melalui perlawanan-perlawanan terhadap negara-negara yang pernah mendudukinya. Berbeda dengan kondisi yang pertama, ada pula beberapa negara yang menunggu hasil keputusan dari negara yang pernah menduduki mereka mengenai status negaranya, seperti Filipina, Malaysia dan Singapura. Negara-negara yang berusaha keras memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan-perlawanan itu di antaranya Indonesia, Myanmar (Burma) dan Vietnam. Kondisi-kondisi tersebut dijelaskan pula oleh Hall (1975:777);

Meskipun kemenangan orang Asia telah menyebabkan suatu tirani yang bermoral buruk seperti pernah dijalankan oleh orang-orang Eropa, dengan perampasan dan kelaparan sebagai ganti “kemakmuran bersama” yang begitu banyak diiklankan, namun dengan pengecualian Malaya, tak membuatnya ingin untuk mengembalikan pemerintahan orang kulit putih itu. Di Indonesia, Burma dan Vietnam itu merupakan keinginan untuk merdeka. Di negari-negeri ini kemauan politik berjalan begitu tinggi hingga hal-hal yang sulit dari situasi ekonomi tidak begitu dirasakan.

Perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan dari ketiga negara tersebut berbeda-beda. Indonesia berusaha keras untuk mempertahankan kemerdekaan dan menolak kedatangan kembali Belanda, Myanmar menolak kedatangan Inggris, sedangkan Vietnam berusaha menolak kekuasaan Perancis. Dari ketiga negara tersebut perjuang rakyat Vietnam yang cukup banyak mendapatkan perhatian dari berbagai negara, setelah PD II berakhir. Hal itu disebabkan, karena perjuangan rakyat Vietnam terhadap dominasi asing tidak berhenti sampai Perancis (1946-1954) saja. Dalam perkembangannya, sejak berakhirnya dominasi Perancis pada tahun 1954 permasalahan di Vietnam mulai melibatkan pula negara-negara yang dianggap

sebagai pemenang perang pada PD II. Negara-negara yang dimaksud seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keterlibatan negara-negara tersebut kemudian berkembang menjadi permasalahan baru yang dikenal dengan istilah Perang Indocina II atau Perang Vietnam, sampai tahun 1975.

Permasalahan Vietnam, merupakan permasalahan yang muncul sebagai dampak atas kekalahan negara-negara Poros (Jerman, Italia dan Jepang di wilayah Asia-Pasifik) di PD II. Kekalahan negara-negara Poros tersebut menghasilkan suatu bentuk perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Postdam. Kemudian “berdasarkan Perjanjian Postdam, wilayah Vietnam merupakan wilayah yang harus dikembalikan kepada pihak Perancis” (Iskandar, 1971:224). Ketika PD II berlangsung, Vietnam merupakan salah satu negara yang berhasil direbut dan diduduki oleh Jepang, dari pihak Perancis sebelumnya.

Setelah PD II berakhir dan kekalahan Jepang di Pasifik, status Vietnam pun harus dikembalikan lagi kepada pihak Perancis. Mengenai pengambil alihan wilayah Vietnam dari tangan Jepang ke pihak Perancis, telah diatur pula di dalam perjanjian Postdam. Berdasarkan perjanjian Postdam, menurut Hall (1975:792) dalam tulisannya menjelaskan mengenai penugasaan terhadap negara RRC (Republik Rakyat Cina) dan Inggris dalam proses pengambil alihan tersebut ;

RRC ditugaskan untuk menduduki bagian utara Vietnam sampai 17 derajat garis lintang, sedangkan tentara Inggris melakukan hal yang sama dengan menduduki bagian selatan. Namun karena Inggris tidak disenangi di Vietnam, tugas Inggris digantikan oleh Perancis.

Dari penugasan-penugasan tersebut dapat diketahui bahwa status Vietnam untuk sementara waktu diselesaikan oleh dua negara yang berbeda, RRC di Vietnam Utara sedangkan Perancis di Vietnam Selatan. Namun perlu ditekankan di sini bahwa RRC maupun Perancis memiliki perbedaan pandangan mengenai kondisi Vietnam pada saat itu, khususnya mengenai gerakan-gerakan masyarakat Vietnam yang mulai berkeinginan untuk melakukan perubahan-perubahan.

Sebelum kedatangan RRC, Inggris maupun Perancis kembali ke Vietnam, Ho Chi Minh telah mengumumkan berdirinya negara Republik Demokrasi Vietnam (RDV) dan melakukan penolakan-penolakan terhadap kedatangan

mereka. Langkah yang dilakukan Ho Chi Minh ini dijelaskan pula oleh Iskandar (1971:225) ;

Pada tanggal 2 September 1945 Ho Chi Minh, seorang pemimpin *Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi* (Liga untuk kemerdekaan Vietnam) yang lebih dikenal dengan sebutan Viet Minh, telah mengumumkan berdirinya negara Republik Demokrasi Vietnam (RDV) dengan ibukota Hanoi di Vietnam bagian Utara.

Inisiatif dari Ho Chi Minh untuk mendeklarasikan berdirinya RDV merupakan penggambaran bahwa rasa keinginannya untuk terbebas dari penjajahan atau bahkan suatu titik puncak dari pandangan rakyat Vietnam untuk tidak ingin kembali berada di bawah kekuasaan negara-negara asing.

Sementara itu, kedatangan Perancis ke Vietnam memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda dengan apa yang dicita-citakan oleh rakyat Vietnam. Perancis berkeinginan untuk menjadikan Vietnam sebagai negara Federasi Indocina dan bagian dari Uni Perancis. “Keinginan Perancis tersebut direalisasikan dengan mengangkat Bao Dai pada tahun 1948 sebagai kepala dominion Perancis yang terdiri dari Chocincina, Vietnam dan Tonking di bagian Vietnam Selatan” (Sudharmono, 2012:191). Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan para pemimpin Viet Minh, seperti Ho Chi Minh yang mengharapkan kekuasaan penuh atas penggabungan seluruh Vietnam bagian utara maupun selatan. Tentunya ada faktor tertentu yang menjadi dasar penolakan para petinggi Viet Minh mengenai pengangkatan dan penggabungan wilayah tersebut.

Sejak tahun 1946 pertikaian bersenjata antara Viet Minh dan Perancis tidak dapat dihindarkan. Permasalahan antara Viet Minh dan Perancis berkembang menjadi semakin tegang setelah negara-negara lain melakukan intervensi di dalam masalah tersebut. Sejak tahun 1950an Amerika Serikat, Uni Soviet dan RRC mulai memperhatikan dan mulai berusaha terlibat di permasalahan Vietnam. Mereka merupakan negara-negara yang digolongkan ke dalam blok-blok negara di persaingan Perang Dingin. Sudharmono (2012:191) menjelaskan berbagai usaha dari negara lainnya yang ikut terlibat di permasalahan Vietnam;

Intervensi tersebut diawali oleh RRC dengan mengakui pemerintahan Viet Minh sebagai kekuasaan yang berdaulat di Vietnam pada 19 Januari 1950. Tindakan RRC itu didukung oleh Uni Soviet dan sekutunya. Sebagai imbangannya, pada tanggal 6 Februari 1950 Inggris dan Amerika Serikat secara resmi mengakui kekuasaan Vietnam atas pemimpin Bao Dai. Dengan munculnya negara-negara tersebut, permasalahan Vietnam membuka lembaran baru dan tenggelam dalam istilah Perang Dingin.

Pada dasarnya Amerika Serikat mendukung organisasi dan gerakan yang dianggap sebagai anti komunis sedangkan Uni Soviet dan Cina komunis berpihak kepada organisasi-organisasi kiri atau gerakan komunis. Persaingan antara kedua negara tersebut selama Perang Dingin, dapat terlihat dari usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mempengaruhi dan memanaskan persaingan antara keduanya.

Permasalahan antara Perancis dan Viet Minh berakhir, ditandai dengan diadakannya Perjanjian Jenewa pada tahun 1954. Sesuai dengan isi dari Perjanjian Jenewa tersebut, Perancis diharuskan untuk meninggalkan wilayah Indocina termasuk dari Vietnam. Selain itu, sesuai dengan perjanjian Jenewa wilayah Vietnam untuk sementara waktu dibagi ke dalam dua wilayah yang berbeda yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pembagian tersebut dijelaskan oleh Lee (1961:27) ;

Pembagian Vietnam tersebut didasarkan pada garis lintang 17 derajat dengan garis demarkasi yang ditetapkan sepanjang 9 km dari sungai Benhai, sebelum diadakannya pemilihan umum pada tahun 1956 untuk memilih pemerintah yang berkuasa diseluruh Vietnam.

Pembagian Vietnam menjadi dua wilayah yang berbeda, kemudian munculnya intervensi dari negara lain pada saat itu, membawa Vietnam ke dalam permasalahan yang baru. Intervensi dari negara lain mulai mempengaruhi dan membawa ideologi yang berbeda. Vietnam di bagian Utara (Viet Minh) membawa Ideologi komunis Nasional, dipimpin oleh Ho Chi Minh dan didukung oleh Uni Soviet dan RRC. Sedangkan Vietnam di bagian selatan di bawah kerajaan yang bukan komunis dipimpin oleh Bao Dai dan didukung oleh Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya. Baik Vietnam Utara maupun Vietnam Selatan, keduanya berkeinginan untuk menyatukan wilayah Vietnam sesuai dengan masing-masing ideologi yang mereka bawa.

Meningkatnya intervensi dari negara lain, khususnya Amerika Serikat di Vietnam, berkaitan dengan politik luar negeri Amerika Serikat yang pada saat itu mempengaruhi pandangannya mengenai kekhawatiran dari komunisme di wilayah Asia. Hal ini dijelaskan oleh Sardesai (1992:66), *US policy toward Vietnam was principally governed by the doctrine of containment of communism almost consistently from the early 1950s to least the end of the following decade*". (Politik Amerika Serikat terhadap Vietnam pada dasarnya dipengaruhi oleh doktrin untuk membendung komunisme yang telah dilakukan secara konsisten, paling tidak sejak awal 1950-an sampai akhir dekade berikutnya). Kekalahan dan perginya Perancis dari Vietnam setelah Perjanjian Jenewa memberikan pengaruh kuat terhadap politik luar negeri Amerika Serikat pada saat itu, untuk semakin terlibat di permasalahan Vietnam. Maka pada perkembangan selanjutnya, permasalahan di Vietnam yang pada awalnya antara Viet Minh dengan Perancis, berubah menjadi permasalahan antara Vietnam Selatan beserta Amerika Serikat sebagai sekutunya, melawan Viet Minh di pihak Vietnam Utara. Permasalahan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan tersebut pada akhirnya dikenal dengan istilah Perang Vietnam.

Usaha pertama yang dilakukan oleh menteri luar negeri Amerika Serikat setelah perjanjian Jenewa, yaitu merencanakan untuk membuat suatu aksi bersama dengan negara-negara sekutunya dalam membendung penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Seperti yang diungkapkan oleh Winarko (2007:44) ;

Pada saat terakhir pelaksanaan konferensi Jenewa menteri luar negeri Amerika Serikat, John Foster Dulles membuat "aksi bersama" sebuah strategi baru ini dilakukan dengan mengajak Inggris dan Perancis serta negara-negara lainnya untuk membuat Pakta perjanjian yang menjadi tandingan dari semangat Jenewa.

Munculnya inisiatif Dulles untuk membentuk aksi bersama pada saat itu, merupakan suatu penggambaran dari strategi politik luar negeri Amerika Serikat untuk membendung penyebaran komunis. Perhatian Amerika Serikat terhadap perkembangan komunis di daratan Asia itu memberikan pengaruh yang kuat bagi negaranya untuk mencari kawan atau membentuk aliansi dengan negara-negara yang tidak menyukai muncul dan berkembangnya paham komunis, khususnya

untuk membantu Perancis yang sedang meghadapi gerakan perlawanan komunis di Vietnam pada saat itu.

Rencana Dulles tersebut direalisasikan pada tanggal 8 September 1954 di Manila, dengan terbentuknya suatu pakta pertahanan di Asia Tenggara yang bernama *South East Treaty Organization* (SEATO). Faktanya ada hal yang menarik mengenai pakta pertahanan SEATO termasuk keterlibatan Australia di Perang Vietnam. *Pertama*, terletak pada negara-negara Anggota SEATO. Penamaan Asia Tenggara pada Pakta pertahanan ini, tidak sesuai dengan keikutsertaan dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dapat terlihat dari, hanya dua negara saja yang berada di kawasan Asia Tenggara yang ikut serta dalam pakta pertahanan SEATO, yaitu Thailand dan Filipina. Sedangkan anggota SEATO yang lainnya merupakan negara-negara yang berasal dari luar kawasan Asia Tenggara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, New Zealand dan Pakistan. Sementara itu, kekuatan dari negara-negara yang berada di kawasan Asia seperti India, Indonesia dan Burma menjadi pihak yang menentang Pakta tersebut.

Menurut Sardiman (1983:22) “Thailand dan Filipina telah lama dikenal dunia sebagai pengikut Amerika Serikat yang setia di timur pada waktu masih dalam hubungan pembendungan komunisme pada saat itu”. Maka dari itu, penamaan Asia Tenggara pada Pakta SEATO tentunya tidak didasarkan pada keinginan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara untuk membendung komunisme, namun pakta ini dibentuk atas dasar usaha Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya untuk membendung perkembangan komunis yang berkembang di Asia Tenggara.

Kedua, tidak semua negara-negara anggota SEATO itu terlibat di Perang Vietnam. Faktanya bahwa negara-negara anggota SEATO, Australia dan New Zealand yang paling mendukung Amerika Serikat di Vietnam. Hal ini terlihat dari usaha Australia untuk ikut terlibat pula di Perang Vietnam, dengan mengirimkan berbagai bantuan militernya di sana. Sedangkan, negara-negara sekutu Amerika Serikat lainnya di SEATO seperti Inggris dan Perancis, tidak terlalu mendukung atas keterlibatan Amerika Serikat yang terlalu mencampuri masalah di Vietnam.

Hal tersebut dijelaskan oleh Stephani (2013:38) bahwa, "Perancis dan Inggris juga sudah memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak campur tangan terlalu dalam dengan Vietnam karena dua negara ini sudah tahu betul bagaimana kekuatan rakyat Vietnam".

Ketiga, berkaitan dengan keterlibatan Australia di Perang Vietnam. Pakta SEATO telah dibentuk sejak tahun 1954 dengan tujuan untuk membendung penyebaran komunis di Asia, khususnya di Asia Tenggara, khususnya perkembangan komunis di Vietnam itu sendiri. Namun Australia baru merencanakan niatnya untuk mengirimkan bantuan militernya ke Vietnam pada tahun 1962. Rencana pengiriman bantuan kepada Vietnam Selatan tersebut dijelaskan oleh Ross (1995:1) ;

On 26th July, 1962, the Minister for Defence announced Australia's intention to send 30 instructors to the Republic of Vietnam, 4 going to the Military Aid Council Vietnam (MACV) Headquarters in Saigon, 22 to regional locations in the Hue area

Perbedaan tahun di mana dibentuknya Pakta SEATO pada tahun 1954 dengan rencana pengiriman bantuan Australia secara militer ke Vietnam pada tahun 1962, seperti yang telah dijelaskan di atas tentunya memberikan hal yang menarik dan perlu dianalisis lebih mendalam mengenai keterlibatan Australia di Vietnam. Bila dihubungkan dengan faktor yang membawanya ke sana itu, apa hanya sebagai bagian keanggotaanya di SEATO saja atau ada faktor lainnya yang membawa Australia sehingga terlibat di Perang Vietnam.

Selain itu bila dihubungkan dengan usaha Australia untuk membendung penyebaran komunis di Asia. Mengapa Australia lebih memberikan perhatiannya ke permasalahan di Vietnam, dibandingkan dengan perkembangan komunis di Indonesia ? Karena, faktanya bahwa perkembangan komunis di Indonesia mulai memperlihatkan pergerakannya pada tahun 1960-an. Pergerakan komunis yang mulai berkembang di Indonesia itu dijelaskan oleh Ricklefs (2009:557-558) ;

Perkembangan komunis di Indonesia mulai meningkat sejak tahun 1960. Partai Komunis Indonesia (PKI) mulai bergerak di daerah-daerah mendekati petani dan buruh untuk melakukan suatu tindakan-tindakan radikal. Walaupun gerakan-gerakan tersebut masih dapat ditahan oleh pihak tentara. Perkembangan komunis di Indonesia semakin ditunjukkan,

dengan kedatangan Krushev (Uni Soviet) ke Jakarta pada bulan Januari 1960. Kedatangan Krushev ke Indonesia, dalam perihal untuk memberikan pinjaman dana guna kebutuhan militer Indonesia dalam menghadapi masalah Papua.

Perkembangan komunis yang perlu ditujukan oleh pemerintah Australia ke Indonesia itu, tentunya berkaitan dengan letak geografis Indonesia yang lebih dekat dengan Australia dibandingkan dengan wilayah Vietnam. Pengalaman PD II menunjukkan bahwa Indonesia merupakan payung pertahanan Australia terakhir dari ancaman yang datang ke negaranya, seperti ancaman Jepang pada saat PD II.

Keterlibatan Australia di Perang Vietnam, memberikan ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisisnya lebih mendalam, baik mengenai latar belakang yang membawa Australia terlibat di sana, bentuk keterlibatannya selama di sana sampai dampak dari keterlibatan Australia di Perang Vietnam terhadap perkembangan politik dan sosial negaranya. Sementara itu, peneliti menyadari bahwa banyaknya sumber literatur yang telah membahas mengenai keterlibatan Australia di Perang Vietnam. Namun sumber dari literatur yang ditemukan pun perlu dialih bahasakan terlebih dahulu, karena jarang literatur yang menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun banyaknya sumber yang telah membahas mengenai keterlibatan Australia di Perang Vietnam itu, peneliti menyadari bahwa kebanyakan sumber tersebut lebih condong terhadap persepsi atau pandangan salah satu pihak tertentu. Maka dari itu, penelitian mengenai keterlibatan Australia di Perang Vietnam yang diangkat peneliti ini akan menjadi keunikan dan berbeda tersendiri dari beberapa literatur yang membahas topik yang sama ini, karena peneliti mencoba mengkajinya ke dalam satu pandangan yang tidak memihak ke dalam salah satu pihak atau netral.

Bagi Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), penelitian ini pun diharapkan dapat memperkaya tulisan mengenai sejarah negara Australia. Karena sejauh ini skripsi yang meneliti tentang sejarah Australia, khususnya dalam keterlibatannya Australia di permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik masih jarang ditemukan. Maka topik yang peneliti angkat ini akan memperkaya wawasan pengetahuan mengenai sejarah Australia. Berangkat dari tujuan penulisan sejarah itu yaitu

untuk menganalisis suatu peristiwa masa lalu agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dapat menjadi sebuah pembelajaran untuk masa akan datang.

Berdasarkan penekanan pada kesenjangan dari fakta yang ditemukan dan alasan praktis perlunya topik penelitian ini untuk diangkat, maka peneliti pun menetapkan judul penelitian ini yaitu **Keterlibatan Australia Dalam Perang Vietnam 1962-1975**. Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis topik hal tersebut, peneliti menetapkan tahun awal yaitu 1962. Tahun ini dipilih berdasarkan pada tahun di mana pemerintah Australia mulai mengirimkan pasukan militernya ke Vietnam. Untuk pembatasan tahun akhir penelitian yaitu 1975. Penempatan tahun ini didasarkan pada tahun di mana berakhirnya Perang Vietnam, yang ditandai dengan menyerahnya pasukan Vietnam Selatan kepada pasukan Vietnam Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah utama yang dijadikan fokus penelitian yaitu Mengapa Australia terlibat dalam Perang Vietnam 1962-1975 ? Maka untuk menjawab fokus penelitian tersebut, peneliti menyusun beberapa pertanyaan penelitian di antaranya:

1. Apa yang melatarbelakangi keterlibatan Australia di Perang Vietnam?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan Australia selama di Perang Vietnam?
3. Bagaimana dampak dari keterlibatan Australia di Perang Vietnam terhadap kondisi sosial-politik negaranya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis keterlibatan Australia dalam Perang Vietnam 1962-1975. Selain itu penelitian karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan latar belakang yang membawa Australia sehingga terlibat di Perang Vietnam.
2. Mendeskripsikan bentuk keterlibatan yang dilakukan Australia di Perang Vietnam.

3. Menganalisis dampak dari keterlibatan Australia di Perang Vietnam terhadap kondisi sosial-politik negaranya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara umum diharapkan memberikan gambaran dari tujuan, bagaimana bentuk keterlibatan dan dampak dari keterlibatan Australia terhadap permasalahan Vietnam 1962-1975. Adapun secara khusus penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak di antaranya;

1. Bagi peneliti, tulisan ini diharapkan menjadi salah satu bentuk pengalaman baik bagi peneliti dalam menempuh gelar sarjana S1. Selain itu peneliti pun berharap dengan adanya tulisan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, pemikiran dan perbandingan dalam penelitian sejarah lainnya yang berkaitan dengan kajian tentang sejarah politik luar negeri Australia
2. Bagi Departemen Pendidikan Sejarah, tulisan ini diharapkan mampu untuk memperkaya penelitian sejarah yang berkaitan dengan sejarah bangsa-bangsa Eropa, khususnya mengenai Sejarah Australia
3. Bagi para mahasiswa, tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber tambahan dalam memperluas wawasan mengenai sejarah Australia, khususnya dalam berbagai keterlibatannya atas permasalahan-permasalahan di Asia Tenggara.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Rangkaian penelitian yang dilakukan dari awal sampai akhir, kemudian dituliskan sesuai struktur organisasi skripsi. Struktur organisasi skripsi ini mengacu pada sistematika penulisan skripsi dalam pedoman karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2013). Adapun struktur organisasi skripsi ini terdiri dari lima Bab ;

Bab I, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengungkapkan latar belakang masalah, yang di dalamnya memuat penjelasan mengapa penulis mengkaji atau tertarik untuk melakukan penulisan mengenai tema ini. Selain itu,

bab ini pun memuat mengenai rumusan dan pembatasan masalah penelitian, agar penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus dan tidak melebar. Bab ini pun memuat mengenai tujuan dan manfaat penulisan skripsi. Terakhir dalam bab ini diuraikan mengenai struktur organisasi skripsi yang digunakan sebagai kerangka dan pedoman dalam penyusunan skripsi.

Bab II, merupakan bagian dari kajian pustaka dan landasan teori. Pada Bab ini penulis akan memaparkan mengenai sumber-sumber buku yang digunakan penulis sebagai bahan referensi yang dianggap relevan. Bab ini juga menyajikan konsep-konsep dan teori yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini. Selain itu dijelaskan pula tentang beberapa kajian atau berbagai penelitian terdahulu mengenai keterlibatan Australia di Perang Vietnam.

Bab III, merupakan metode penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai serangkaian kegiatan serta cara-cara yang ditempuh penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini guna mendapatkan sumber relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji penulis. Adapun metode yang digunakan adalah metode historis yang memang lazim digunakan dalam penelitian sejarah dan teknik yang digunakan adalah studi literatur.

Bab IV, merupakan pembahasan mengenai keterlibatan Australia di Perang Vietnam 1962-1975. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keterlibatan Australia selama di Perang Vietnam, dimulai dari kondisi Vietnam setelah perjanjian Jenewa, latar belakang Australia terlibat di Vietnam, bentuk keterlibatan yang dilakukan dan dampak dari keterlibatan Australia terhadap masalah

Bab V, merupakan bagian simpulan dan rekomendasi. Bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan di dalam rumusan masalah. Selain itu bab terakhir ini juga dipaparkan mengenai beberapa rekomendasi yang mungkin dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.